



PENDEKATAN *RATIONAL CHOICE* PADA REFORMASI EKONOMI (*DOI MOI*) DI VIETNAM

Nevy Rusmarina Dewi

Institut Agama Islam Negeri Kudus
nevyrusmarina@gmail.com

Abstract

The development of world globalization after the end of the Cold War made many countries in the world adapt to the changes in the existing world constellation. The countries that were most affected were those who supported the Eastern Bloc with communist ideology. Some countries in Asia with communist ideology, such as China, Vietnam, and Laos, have had to face such rapid changes in the world. The conflict between maintaining ideology by adopting the values of globalization is a very important issue. China strives not to be trapped in the entanglement of the globalization of the world by changing the pattern of thinking for the achievement of its economy through economic reform. Economic reform by opening up the economy in welcoming world free trade to take advantage of world trade, but still maintaining communist ideology is the solution for China. China's success in its economic reforms was taken into consideration for Vietnam, its communist ally, to adopt the same steps. With very bad economic conditions after the end of the Vietnam War and its limitations in carrying out reconstruction, real action was greatly needed by Vietnam amid the end of dependence on the Soviet Union. The economic reform movement through "Doi Moi" took effect since 1986 to overcome economic turmoil and efforts to carry out reconstruction reconstruction. The ideology he embraced made it a barrier for the international community to provide assistance to Vietnam. Globalization cannot be rejected because it provides an opportunity for the development and economic growth of a country.

Keywords: Vietnam, Doi Moi, Communism, Globalization.

Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin diikuti dengan runtuhnya Uni Soviet dan dominasi demokrasi di dunia. Gelombang demokrasi secara besar – besaran berkembang ke seluruh dunia. Namun, hal ini tidak membuat tiga Negara penganut komunis di Asia ikut terbawa

arus perubahan dunia. Cina, Vietnam, dan Korea Utara tetap mengukuhkan komunis sebagai ideologi Negara. Selama Perang Vietnam berlangsung, Cina sebagai Negara tetangga sekaligus sekutu komunis memberi bantuan penuh baik ekonomi dan militer dalam rangka mempertahankan dominasi komunis agar tidak jatuh pada AS. Perang berakhir dengan kemenangan Vietnam Utara sehingga mematahkan dominasi AS di bagian selatan. Pasca berakhirnya Perang Vietnam tahun 1975 Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu dan berusaha keluar dari keterpurukan akibat perang.

Derasnya arus demokrasi pasca berakhirnya Perang Dingin tidak membuat goyah Vietnam untuk mengukuhkan komunis sebagai ideologi negara sampai saat ini. Banyak Negara komunis yang terlindas arus demokrasi dan globalisasi, bertahan dan menutup diri dari pergaulan internasional ataukah terbuka dan ikut serta dengan arus yang ada. Vietnam berusaha untuk tetap bisa bertahan namun tidak ingin terlindas dengan arus demokrasi dan globalisasi.

Cina sebagai sekutu komunis Vietnam, pasca Perang Vietnam di bawah Deng Xiaoping mulai berbenah diri, puncaknya dengan melakukan Reformasi pada tahun 1980 dengan mengubah ekonomi terpusat menjadi ekonomi yang berorientasi pada pasar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mengatasi berbagai permasalahan seperti inflasi, pengangguran, dan standar hidup. Dalam hitungan tahun Cina berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi dan perlahan – lahan mulai bangkit menjadi negara yang kuat dalam bidang ekonomi, namun tidak meruntuhkan ideologi komunisnya. Berkaca terhadap apa yang dilakukan Cina yaitu mempertahankan komunis namun tetap terbuka terhadap dunia internasional maka Vietnam pun ikut berbenah diri dengan melakukan perubahan ke dalam maupun ke luar melalui “*Doi Moi*” istilah dari Reformasi Ekonomi Vietnam pada tahun 1986. Perubahan juga dilakukan dalam bidang politik melalui perubahan konstitusi pada tahun 1992.

Perubahan kebijakan luar negeri Vietnam juga mulai digalakkan, salah satunya dengan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara seperti dengan Cina pada tahun 1991 yang kemudian dilanjutkan kerjasama ekonomi dengan tujuan utama belajar terhadap kesuksesan Cina meningkatkan ekonominya dengan membuka diri pada dunia internasional. Normalisasi hubungan juga dilakukan dengan Amerika Serikat tahun 1995, namun hubungan diplomatik dan kerjasama perdagangan baru berjalan dengan efektif pada tahun 2001. Vietnam mulai menggeliat dalam perekonomian semenjak reformasi ekonomi yang mulai digulirkan. Pasar bebas mulai dijalankan, kerjasama ekonomi dengan berbagai negara di dunia mulai dijalankan tanpa berusaha merubah Ideologi komunisnya. Vietnam mulai merangkak dengan pertumbuhan 0,5 persen menjadi 8 persen pada tahun 2007 -2008. Selama 30 tahun Vietnam berusaha mengejar ketertinggalan ekonomi dan berusaha menjadi negara maju pada tahun 2020. Perubahan arah kebijakan yang dilakukan oleh Vietnam tersebut sangat menarik untuk dianalisis. Pertimbangan – pertimbangan di balik perubahan kebijakan, serta tahapan – tahapan proses yang harus dilalui oleh Vietnam dalam mencapai hasil kebijakan tersebut. Untuk itu digunakanlah pendekatan *Rational Choice* untuk menganalisis apa yang telah dilakukan oleh Vietnam. Melalui teori tersebut akan dijelaskan proses yang berlangsung sebagai dasar perubahan kebijakan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori, yang berusaha menjelaskan fenomena – fenomena yang diamati. Fenomena – fenomena yang terjadi pasca berakhirnya Perang Vietnam yang berlanjut dengan runtuhnya dominasi komunis dunia, dan perkembangan globalisasi yang sangat pesat. Isu globalisasi menjadi sangat menarik karena yang menjadi fokus kajian adalah Vietnam yang memiliki ideologi komunis. Fenomena yang terjadi pada perubahan konstelasi dunia sangat berpengaruh bagi pengambilan kebijakan Vietnam dalam menghadapi globalisasi. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan melalui kajian pustaka yang berasal dari berbagai macam sumber, seperti buku, jurnal, berita media cetak maupun elektronik *online*.

Kajian Teori

Rational Choice Theory

Rational Choice sebagai salah satu pendekatan dalam mempelajari politik dalam hal ini menganalisis latar belakang reformasi “*Doi Moi*” yang dilakukan oleh Vietnam. *Teori Rational Choice* secara umum melihat suatu pilihan secara rasional kepada kalkulasi untung dan rugi. Apa pilihan yang terbaik di antara banyak pilihan yang ada. Hal ini utamanya dilakukan dalam rangka hubungan kerja sama, berusaha mencari solusi yang terbaik diantara alternatif – alternatif yang ada. Terutama dalam bidang ekonomi, dalam suatu hubungan kerjasama masing – masing pihak akan mengkalkulasikan untung – rugi dalam mengambil keputusan.

Menurut Charles W. Kegley dan Shanon Blanton, Teori Rational Choice merupakan teori yang memuat prosedur dalam proses pembuatan keputusan yang didahului dengan proses pendefinisian berdasarkan situasi yang ada dengan pertimbangan mengambil opsi terbaik dari segala alternative ada demi mencapai hasil yang paling optimal (W.Kegley, JR, Charles, 2010, p. 196). Sedangkan menurut Andrew T Guzman, bahwa kepentingan suatu negara akan mendorong suatu tindakan rasional untuk berusaha mencari keuntungan yang sebesar – besarnya bagi kepentingan negara dengan cara mengidentifikasi kondisi yang ada tanpa memikirkan kepentingan negara lain (T. Guzman, 2008, p. 17).

Dalam usaha optimalisasi alternative – alternative pilihan, didahului dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada. Urutan pengambilan keputusan menurut Charles W. Kegley terdiri dari: pengakuan dan definisi masalah, menyeleksi tujuan, mengidentifikasi alternative – alternative yang ada, dan pilihan terbaik (W.Kegley, JR, Charles, 2010, p. 196). Tahapan – tahapan tersebut bisa menjelaskan proses yang berlangsung pada pembuatan kebijakan oleh suatu Negara.

Pengakuan dan definisi masalah

Langkah pertama yang dilakukan adalah melihat karakteristik kondisi masalah yang ada, selanjutnya pengumpulan data informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tindakan suatu Negara yang disesuaikan dengan tindakan yang akan diambil melalui kebijakan luar negeri suatu Negara.

Dilihat dari Kasus Vietnam, di tengah keterpurukan negara pasca perang Vietnam, dapat diidentifikasi bahwa posisi Vietnam sangat lemah dimana kondisinya sangat tidak

menguntungkan karena kesulitan untuk mendapatkan dukungan bagi pemulihan negara terutama masalah keterpurukan ekonomi. Vietnam tidak bisa bergantung pada Uni Soviet dan mulai ditinggalkan oleh Cina yang selama ini menjadi sekutunya dan punya hubungan yang sangat baik.

Di mata dunia internasional Vietnam tidak mendapatkan simpati yang baik karena hubungannya yang sangat dekat dengan Uni Soviet sehingga bantuan internasional sangat sulit untuk masuk ke Vietnam. Sedangkan di satu sisi negara ini sangat butuh restrukturisasi pembangunan secara cepat untuk memulihkan kondisi.

Menyeleksi Tujuan

Identifikasi masalah di atas, selanjutnya adalah mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki. Hal ini akan teridentifikasi beberapa tujuan sekaligus, sehingga perlu untuk diseleksi tujuan yang paling sesuai dengan kondisi yang ada dalam suatu negara.

Kondisi keterpurukan yang dialami Vietnam dapat diidentifikasi beberapa tujuan yang dirumuskan, apakah akan mempertahankan ideologi komunis dengan sistem sosialis ataukah fokus kepada usaha bangkit dari keterpurukan ekonomi dan segera dapat merestrukturisasi kondisi di Vietnam pasca berakhirnya Perang Vietnam.

Identifikasi alternative

Dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara, akan mengarahkan pada alternative – alternative pilihan yang dapat dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu Negara. Suatu negara akan mengidentifikasi alternatif – alternatif pilihan kebijakan yang akan dibuat oleh suatu negara terkait dengan kebijakan luar negerinya.

Dengan berakhirnya Perang Dingin yang diikuti dengan dorongan kuat gerakan demokrasi di berbagai negara di seluruh penjuru dunia, membuat ideologi komunis runtuh dan banyak negara bekas Uni Soviet yang ikut arus demokrasi dan globalisasi dunia. Di tengah perubahan konstelasi dunia tersebut, Vietnam berusaha mengidentifikasi berbagai alternatif pilihan kebijakannya. Apakah ikut tergerus arus demokrasi dan globalisasi, apakah mempertahankan diri bersama komunis dan menutup diri dari pergaulan dunia internasional, ataukah mencari jalan tengah dengan mempertahankan ideologinya namun tetap berusaha ikut serta dalam globalisasi ekonomi demi percepatan pemulihan dari keterpurukan ekonomi seperti yang telah dilakukan oleh Cina.

Pilihan kebijakan terbaik

Dari berbagai alternatif pilihan yang dibuat, diambil pilihan terbaik dari hitungan untung – rugi bagi suatu Negara. Mereka akan otomatis mengambil keuntungan yang paling besar dengan resiko yang paling sedikit rugi. Hal ini dilakukan agar kebijakan luar negeri yang diambil mencapai akurasi paling tinggi untuk mencapai keberhasilan.

Pada akhirnya pilihan terbaik yang diambil oleh Vietnam adalah tetap mempertahankan ideology komunis, namun tidak ingin mengalami kerugian di tengah globalisasi ekonomi dunia yang begitu pesat. Untuk mencapai tujuannya Vietnam melakukan beberapa tindakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya dari pasar bebas yaitu melalui kebijakan reformasi ekonomi yang terbuka terhadap pasar ekonomi bebas. Di

kawasan Asia Tenggara, Vietnam ikut bergabung dengan ASEAN (Asosiation of Southeast Asia Nation), serta berusaha menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang dengan berbagai negara dan organisasi internasional terutama bidang ekonomi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan meninggalkan keterpurukan ekonomi yang selama ini dihadapi. Vietnam tidak ingin terpasung oleh ideologinya yang dibatasi arah gerak bagi peningkatan kesejahteraan Negara. Kebijakan tersebut dirasa paling cocok dengan kondisi yang dihadapi oleh Vietnam.

Shadow Of the Future Theory

Merupakan teori yang berisi tentang konsep pertimbangan keuntungan dalam hubungan kerja sama antar negara. Konsep ini pertimbangan utama adalah keuntungan maksimal yang bisa diraih di masa depan dibandingkan keuntungan sementara yang didapat saat ini dalam penentuan kebijakan suatu negara. Tolak ukur dalam melakukan kerjasama adalah mendapat keuntungan besar di masa mendatang. Konsekuensi untung dan rugi menjadi faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan actor pengambil kebijakan dalam hubungan kerjasama. Teori ini memperkuat dari konsep *Rational Choice* bahwa setiap actor mempertimbangkan untung dan rugi dalam hubungan kerjasama dengan pihak lain. Hal ini memperkuat tujuan utama Vietnam mulai membuka diri terhadap pihak lain dalam hal ini dunia internasional adalah pertimbangan di masa depan untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi Vietnam di tengah kondisi terpuruk yang sedang dihadapi. Pilihan mereformasi kebijakan terbuka dalam ekonomi menjadi satu – satunya jalan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan harapan kerjasama yang dibangun dengan pihak lain akan mengatasi masalah ekonomi dan dalam jangka panjang akan meningkatkan tingkat perekonomian Vietnam.

Hubungan Kerjasama dibutuhkan dua hal utama agar berhasil dalam pelaksanaannya, yaitu proses tawar menawar dan proses pelaksanaan (Fearon, 2011). Proses tawar menawar sangat penting dilakukan sebelum berlangsungnya kerjasama agar tujuan yang diinginkan tercapai. Secara rasional dua pihak akan berusaha memaksimalkan kepentingan nasionalnya, sehingga actor harus punya bayangan hasil di masa mendatang berikut konsekuensinya. Setelah proses tawar – menawar mendapatkan kesepakatan dua belah pihak, proses pelaksanaan kerjasama merupakan focus utama dimana aktor – aktor yang menjalin kerjasama tidak hanya terdiri dua actor, namun bisa tiga actor atau lebih sehingga harus benar – benar bisa memperhatikan aturan – aturan yang telah disepakati. Kesamaan hak merupakan faktor penting dalam melaksanakan kesepakatan sehingga tidak terjadi kerugian di salah satu pihak karena mendapat keuntungan bersama merupakan prinsip dasar suatu kerja sama. Setiap negara harus menyadari bahwa kerjasama antar negara dipahami melalui logika dimana potensi keberhasilan maupun kegagalan dalam kerjasama memiliki kemungkinan yang sama (Rusmarina, 2016, p. 9). Oleh karena itu keputusan aktor dalam rangka memaksimalkan hasil dalam pelaksanaan kerjasama diasumsikan merupakan keputusan yang rasional.

Dengan menjalankan “*Doi Moi*” konsep *shadow of the future* diimplementasikan oleh Vietnam melalui cara menawarkan diri dengan membuka diri bagi dunia internasional namun tetap membatasi diri melalui kebijakan ideology komunis yang masih dianutnya dengan tujuan keberhasilan di bidang ekonomi. Dalam pelaksanaannya Vietnam fokus pada

tujuan ekonomi yaitu melalui kerjasama dengan berbagai aktor di dunia internasional baik melalui bilateral, multilateral, maupun regional.

Pembahasan

Teori *Rational Choice* akan digunakan untuk menganalisis kondisi yang dialami oleh Vietnam pasca Perang Vietnam dan berakhirnya Perang Dingin. Tahapan dari pendefinisian masalah, menyeleksi tujuan, identifikasi alternatif, dan menentukan pilihan yang terbaik. Tahapan – tahapan tersebut sangat berguna bagi pengidentifikasian pada kasus reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Vietnam. Situasi dan kondisi saat itu sangat berpengaruh bagi kebijakan yang diambil oleh Negara. Isu globalisasi yang bergulir menjadi sangat menarik dikaitkan dengan kondisi Vietnam pada masa itu. Kondisi dimana komunis mulai tenggelam oleh gelombang demokrasi, kemudian dihadapkan pada globalisasi ekonomi membuat Vietnam untuk mengidentifikasi posisi dan permasalahan yang dihadapi dalam perubahan konstelasi dunia yang berlangsung cepat. Pendekatan *rational choice* dipakai untuk menganalisis pada kebijakan yang dilakukan oleh Vietnam melalui reformasi ekonomi untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi. Mulai dari identifikasi masalah, membuat tujuan, membuat alternatif pilihan, dan mengambil pilihan terbaik dalam kasus yang dihadapi oleh Vietnam.

Masalah yang Dihadapi Vietnam Pasca Perang Vietnam

Perebutan pengaruh ideologi dunia melalui Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur terjadi secara serentak, komunis tidak hanya terfokus pada Benua Eropa namun juga sudah masuk ke Asia. Perebutan pengaruh antara kedua blok tersebut terjadi di Vietnam, dimana Vietnam bagian Utara berideologi komunis sedang di selatan dipengaruhi oleh blok barat dengan dipimpin oleh Amerika Serikat yang membawa konsep demokrasi. Perang Vietnam menjadi contoh gambaran yang utuh dari Perang Dingin melalui perebutan pengaruh, walaupun pada akhirnya Amerika Serikat mengalami kekalahan. Selama perang berlangsung, Vietnam mendapat dukungan penuh dari Uni Soviet dan Negara sekutu komunisnya yaitu Cina. Cina memiliki pengaruh besar dalam perang karena memberikan bantuan keuangan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan selama perang.

Ketika Perang Vietnam berakhir, kedua Vietnam kemudian bersatu pada tahun 1975 dan menyisakan banyak persoalan yang harus dibenahi oleh Vietnam dalam berbagai bidang terutama dalam merekonstruksi pembangunan. Selama perang berlangsung, telah banyak biaya perang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghalau pengaruh ideology barat. Dukungan ekonomi oleh Cina yang telah berlangsung selama perang terhenti dikarenakan masalah konflik mengenai Kamboja, dimana Vietnam menuduh Cina mengintervensi Kamboja untuk melakukan upaya pelemahan pada Vietnam. Dampak paling signifikan terjadi dalam bidang ekonomi dimana ekonomi Vietnam terpuruk bahkan Inflasi mencapai 700%. Di sisi lain Vietnam melakukan invasi ke Kamboja sehingga menambah beban ekonomi yang harus ditanggung oleh negara. Aksi yang dilakukan tersebut mengakibatkan AS memberikan sanksi embargo ekonomi kepada Vietnam

Keterpurukan ekonomi semakin parah, ketika rekonstruksi pasca perang yang dilakukan Vietnam tidak tercapai sesuai target. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan terutama terkendala dengan sistem sosialis yang digunakan sebagai ciri utama Negara

yang menganut ideologi komunis. Mekanisme sosialis tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya dorongan dalam usaha dan kreativitas dalam ekonomi, sebagai dampak sistem sosialis yang menggunakan mekanisme distribusi yang sama pada warga negaranya. Selama ini Vietnam bergantung pada dukungan ekonomi dari Negara sekutunya Uni Soviet dan Cina. Ketika hubungan terputus, Vietnam kesulitan untuk melakukan adaptasi dalam kebijakan yang diambil dalam pemerintahannya. Dunia internasional enggan memberikan bantuan dalam rangka rekonstruksi pasca perang akibat kedekatan Vietnam dengan Blok Timur.

Puncak krisis ekonomi terjadi pada akhir tahun 1970-an dimana PDB perkapita US\$100 pertahun, produksi pertanian dalam negeri tidak dapat mencukupi konsumsi dalam negeri sehingga impor bahan makanan mencapai 1 juta ton. Banyak usaha yang sudah dilakukan pemerintah Vietnam, seperti usaha untuk memberlakukan kontrak pada produksi pertanian, dengan cara melakukan efisiensi kinerja koperasi yang semula menggunakan manajemen kolektif intervensi langsung menjadi tidak langsung dalam usaha bisnis dan produksi (UNRISD Country, 2008, p. 8).

Pasca Perang Vietnam, terjadi masalah ekonomi yang sangat parah dihadapi oleh Vietnam. Vietnam kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang dihadapi, berbagai cara sudah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Masalah ekonomi menjadi isu utama yang muncul pada Vietnam pada masa itu. Vietnam terjebak diantara kebutuhan yang mendesak bagi rekonstruksi, dengan upaya menjaga tetap berlakunya ideologi komunis yang dianutnya. Pemerintah Vietnam menyadari bahwa banyak bantuan yang seharusnya bisa masuk untuk membangun Vietnam namun terganjal oleh ideologi yang dimilikinya.

Pengaruh Reformasi Ekonomi Cina Terhadap Identifikasi Tujuan Vietnam

Faktor Cina menjadi isu yang sangat penting bagi Vietnam karena pasang surut hubungan yang terjalin antara keduanya. Cina pernah menjadi tempat bergantung bagi Vietnam selama perang Vietnam berlangsung. Konflik terjadi diantara keduanya pasca berakhirnya perang dan Vietnam tidak lagi mendapat bantuan dari Cina. Hal ini salah satu faktor yang menyebabkan Vietnam kesulitan untuk bangkit karena terhentinya dukungan dari Cina. Hubungan kedua Negara tidak hanya berdasarkan ideology namun karena letak wilayahnya yang saling berbatasan. Hal ini membuat hubungan mereka sangat dekat sehingga kebijakan yang dilakukan salah satu negara akan berimbas pada negara yang lain.

Cina melakukan reformasi ekonomi dengan kebijakan terbuka untuk melakukan kerjasama perdagangan secara interasional, masuk ke World Trade Organisation (WTO) pada tahun 1995 menjadi penanda keseriusan dari Cina dalam reformasi ekonomi. Cina menerapkan aksi secara totalitas dalam rangka mewujudkan perekonomiannya. Kebijakan lain yang menjadi penyeimbang keterbukaan ekonomi adalah dengan cara membatasi keterbukaan hanya pada ekonomi saja tanpa mengubah platform komunis. Hal ini menjadi strategi yang paling jitu digunakan oleh Cina dalam membangun ekonominya. Cina berhasil meningkatkan perekonomian negara secara cepat dengan proses yang stabil tanpa menimbulkan gejolak di dalam negeri.

Cina sejak tahun 1949 telah mulai melakukan pembangunan ekonomi yang disebut "Big Push" yaitu dengan usaha untuk mengalihkan usaha membangun ekonomi dari sektor pertanian dialihkan ke sektor industri berat dimana alat – alat produksi dinasionalisasi oleh

negara (Naughton, 2007). Akibat usaha industri yang digalakkan secara besar – besaran ternyata pemerintah Cina tidak bisa memajemen sehingga mengakibatkan inflasi pada tahun 1957. Hal ini terjadi karena Cina sebenarnya adalah Negara yang bertumpu pada sector pertanian namun dipaksakan menuju Negara industri. Puncaknya yaitu terjadi krisis ekonomi pada tahun 1960, dan pemerintah mengambil keputusan untuk kembali ke sektor pertanian.

Pada tahun 1978 Deng Xiaoping menerapkan kebijakan reformasi terbuka dalam bidang ekonomi yang pada awalnya kebijakan utama pada peningkatan ekonomi daerah pedesaan namun perkembangan berikutnya pada tahun 1984 berorientasi pada pasar dan pada wilayah perkotaan. Selanjutnya Cina mengembangkan perekonomiannya secara eksklusif sehingga menurunkan kesenjangan ekonomi secara cepat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Distribusi pemerataan kesejahteraan tidak hanya di pedesaan namun juga di perkotaan sehingga perkembangan ekonomi di Cina menjadi sangat pesat.

Identifikasi Alternatif Melalui Kebijakan Reformasi Ekonomi Gradualis

Pada saat menurunnya tensi ketegangan antara Blok Barat dengan Blok Timur, hal ini menimbulkan suatu gejolak pada negara – negara yang menggunakan komunis sebagai ideologinya. Ketergantungan dengan Uni Soviet mulai berkurang terutama saat berakhirnya Perang Dingin Negara – Negara pendukung blok timur kehilangan Negara pendukungnya. Masalah yang dihadapi oleh Vietnam dalam hal ekonomi tidak saja hanya dialaminya sendiri, banyak Negara lain terutama di Asia yang mengalaminya seperti Cina dan Laos. Sistem ekonomi sosialis ternyata tidak berjalan dengan baik di tengah kondisi yang dihadapi oleh masing – masing Negara. Hal ini terutama terjadi pada Vietnam yang paling mengalami kesulitan pasca perang yang dialaminya.

Negara – negara komunis berusaha untuk bertahan dibawah tekanan internasional yang mengobarkan semangat demokrasi ke seluruh dunia. Banyak Negara pecahan Uni Soviet yang kemudian mereka bertransformasi menjadi Negara demokrasi dengan banyak konsekuensi yang harus mereka hadapi salahsatunya globalisasi ekonomi. Negara – negara di bawah komunis kesulitan ketika mereka ingin meningkatkan perekonomian negaranya dikarenakan Negara sekutunya telah banyak berkurang. Tujuan Negara – Negara tersebut adalah sama yaitu meningkatkan perekonomian Negara, namun mereka kesulitan dalam pelaksanaannya dikarenakan banyak hal yang bertentangan dengan sistem komunis yang mereka gunakan.

Gelombang demokrasi membawa arus globalisasi dunia, arus ini tidak mungkin terelakkan bagi semua Negara di dunia ini. Menghapus komunis dengan mengganti demokrasi yang diikuti oleh liberalisasi ekonomi merupakan satu cara yang harus dilakukan oleh negara – negara pecahan Uni Soviet pasca berakhirnya Perang Dingin. Percepatan pertumbuhan ekonomi Negara melalui liberalisasi menjadi tuntutan utama dalam perdagangan dunia. Iktu serta atau tertinggal dalam perekonomian menjadi satu alternatif pilihan bagi negara – negara di dunia. Hal ini terjadi karena semua negara berlomba – lomba melakukan peningkatan perekonomian negara masing – masing. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga menjadi tujuan utama bagi negara – negara berideologi komunis, terutama Vietnam. Alternatif yang dimiliki adalah memilih proses yang stabil namun pergerakannya lambat atau melalui

proses yang harus dilakukan berbagai macam strategi namun cepat. Liberalisasi ekonomi akan berjalan dengan sangat cepat jika dilakukan pada Negara – Negara komunis namun dampak yang akan dihadapi dalam negeri akan sangat berat. Untuk itu Negara komunis dibutuhkan pilihan alternatif lain yang bisa menjembatani antara tujuan yang ingin dicapai namun tidak menimbulkan instabilitas dalam negeri terkait ideology komunis.

Muncullah model *Reformasi Ekonomi Gradualis* yang merupakan suatu model baru dalam dunia internasional. Sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu peristiwa reformasi ekonomi yang dilakukan oleh negara – negara yang berideologi komunis. Reformasi ini telah didahului oleh Cina. Model reformasi ekonomi *gradualis* merupakan proses transformasi negara komunis menghadapi gempuran globalisasi ekonomi dunia dengan cara liberalisasi ekonomi, namun tidak pada bidang politik (Marangos, 2002). Liberalisasi hanya dilakukan pada sector ekonomi dan dilakukan secara bertahap agar masyarakat beradaptasi pada keadaan yang berbeda tanpa menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Konsep ini sesuai dengan teori *rational choice* dimana dalam dunia internasional yang sangat pesat perkembangannya, negara harus berpikir secara rasional dalam menjalankan kepentingan nasional. Penolakan terhadap perubahan akan menjadikan kerugian pada kepentingan nasional suatu negara.

Model kebijakan ini menjadi suatu alternatif bagi negara komunis untuk menjawab tantangan perubahan konstelasi dunia yang sangat cepat. Mereka harus berpikir secara rasional bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Keegoisan negara komunis harus diimbangi dengan memikirkan kesejahteraan bagi rakyatnya serta eksistensi Negara di tengah berkembangnya dunia yang sangat pesat. Perkembangan ekonomi dunia menjadi tantangan yang berat bagi negara – negara komunis yang tidak mau terbuka pada dunia internasional yang menawarkan banyak investasi dan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian dalam negeri.

Vietnam belajar kesuksesan dari Cina dalam rangka reformasi ekonomi gradualis dengan melakukan beberapa strategi. Pertama adalah dengan mengirimkan Nguyen Tan Dung dari Partai Politburo central comitte pada tahun 1997 untuk mempelajari strategi yang dilakukan oleh Cina dalam reformasi ekonominya (Guan, 1998, pp. 1122–1141). Dengan gencarnya reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Cina, Negara yang terimbas pertama adalah Vietnam karena Vietnam berbatasan langsung dengan Cina sehingga banyak komoditas perdagangan yang masuk ke Vietnam. Pada waktu selanjutnya, Vietnam kemudian fokus kepada peningkatan investasi asing untuk masuk ke Vietnam untuk menggeliatkan perekonomian di Vietnam. Selanjutnya strategi yang dilakukan Vietnam adalah dengan cara melakukan kerjasama perdagangan diantara kedua Negara. Secara bilateral Cina melakukan normalisasi hubungan dengan Cina pada tahun 1991, dan berlangsunglah perdagangan antara kedua Negara yang saling menguntungkan. Hal ini dilakukan karena Vietnam berbatasan langsung dengan Cina sehingga kegiatan perdagangan yang dilakukan akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu mereka juga bekerjasama di bidang lain dalam rangka merestrukturisasi sector pembangunan dengan kerjasama pembangunan di wilayah perbatasan seperti pembangunan instalasi listrik, instalasi pengairan, fasilitas publik.

Konsep *gradualis* sangat cocok diterapkan di Vietnam di tengah gencarnya arus demokrasi dan globalisasi. Perubahan pola pikir sangat diperlukan demi cita – cita jangka

panjang keluar dari permasalahan ekonomi yang menjerat pasca Perang Vietnam. Vietnam tidak ingin berdiri terlalu lama dalam keterasingan dunia internasional terutama dalam usaha memajukan perekonomian. Dengan mempelajari reformasi yang telah dilakukan lebih dulu oleh Cina, Vietnam mengadopsi konsep yang sama. Terbuka dalam sistem ekonomi namun tetap menjaga ideology yang dimiliki menjadi alternatif yang terbaik yang dipilih oleh Negara – Negara komunis tersebut.

Negara – negara komunis yang melakukan kebijakan reformasi *gradualis* ini antara lain Cina, Vietnam, dan Laos. Ketiga negara ini tetap berusaha mempertahankan sector politiknya dengan komunisme, hal ini dilakukan agar tetap terjaganya kestabilan politik dalam negeri. Selain itu, sistem partai tunggal tetap dipertahankan agar tidak mudah terjadi konflik yang dikarenakan perebutan kekuasaan dari partai – partai oposisi pemerintah. Berbeda dengan Negara – Negara pecahan Uni Soviet yang bertransformasi baik dari sector ekonomi maupun sector politik pasca berakhirnya Perang Dingin.

Kebijakan Reformasi DOI MOI Sebagai Solusi Vietnam dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi yang Dihadapi

Dengan melihat keberhasilan Cina memadukan sistem sosialis dengan ekonomi terbuka, Vietnam merasa bahwa cara yang dilakukan Cina sangat efektif untuk tetap mempertahankan ideology namun masih dapat ikut serta dalam pasar bebas dunia. Kebijakan yang dilakukan Vietnam dalam menjawab tantangan dunia dan usaha untuk mencapai tujuan Negara dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi yaitu melalui kebijakan reformasi ekonomi yang disebut dengan *doi moi*. “*Doi Moi*” istilah dari Reformasi ekonomi yang memperkenalkan Vietnam pada ekonomi global untuk terbuka pada pasar bebas ditetapkan pada Kongres ke – 6 Partai Komunis Vietnam pada tahun 1986 (Gates, 1995). *Doi Moi* dilakukan melalui tiga strategi, yaitu: tahap integrasi ekonomi internasional, tahap reformasi internal melalui sector tradisional, dan terakhir tahap pemerataan ekonomi dan perubahan dalam institusi.

Pada strategi integrasi ekonomi internasional dilakukan dengan cara privatisasi Kebijakan ini berusaha menghapus subsidi yang sebelumnya telah berlangsung pada bidang pertanian dan pada perusahaan – perusahaan untuk dilakukan deregulasi dan investasi asing. Teknologi mulai digunakan untuk memacu keefisienan kinerja dan produksi dalam bidang industry. Usaha utama adalah memasukkan investasi asing, dimana pemerintah Vietnam melakukan banyak usaha untuk bekerjasama dengan Negara lain agar banyak investasi yang masuk ke Vietnam, seperti normalisasi hubungan dengan Cina dan AS. Pemerintah juga melakukan privatisasi BUMN sehingga kepemilikan menjadi perpaduan antara milik pemerintah dengan swasta dan didukung dengan kebijakan investasi agar para investor asing tertarik untuk menanamkan investasinya (Cuc, 2000). Vietnam juga membuat hukum mengenai investasi asing untuk memudahkan regulasi penanaman investasi.

Pada reformasi sector tradisional, pemerintah melakukan tindakan untuk melakukan reformasi hukum tanah. Dari tahap awal nasionalisasi, kolektivisasi, dan yang terakhir adalah privatisasi. Kebijakan ini dilakukan agar penguasaan negara atas hak tanah berkurang dan diimbangi dengan kepemilikan pribadi serta swasta agar masyarakat dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan dapat menjualnya secara bebas sehingga meningkatkan kesejahteraan petani (St. John, 1997). Hal ini dilakukan agar kekuasaan pemerintah

berkurang sehingga ada andil dari sector swasta dalam usaha pengembangan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahap ketiga adalah reformasi institusi dan pemerataan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara membangkitkan konsumsi domestic serta berusaha untuk meningkatkan ekspor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri, mendorong produksi, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Sektor perbankan dilakukan pemisahan antara bank pemerintah dengan bank swasta dan berusaha menjaga agar tidak terjadi inflasi dan krisis keuangan.

Secara bilateral Cina melakukan normalisasi hubungan dengan Cina pada tahun 1991. Perdagangan diantara keduanya tetap berlangsung di daerah perbatasan, walaupun secara resmi kerjasama perdagangan baru dimulai tahun tersebut. Semenjak itu, berlangsung perdagangan antara kedua Negara yang saling menguntungkan. Hal ini bisa dilihat dari tabel perkembangan nilai perdagangan yang sangat signifikan pada tahun 2010 dan 2014. Hal ini menandakan bahwa kedua negara memiliki kebermanfaatn dalam kerjasama perdagangan.

Tabel Perdagangan Cina ke Vietnam tahun 2010 dan 2014 (dalam 10.000 US\$)

Tahun	eksport	%	Import	%	Total
2010	2310154	76.8%	698454	33.2%	3008608
2014	6373001	76.2%	1990640	33.8%	8363641

Sumber: www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexeh.htm

Kebijakan Luar Negeri Vietnam Melalui Amandemen Konstitusi 1992 sebagai Penguatan terhadap Pelaksanaan DOI MOI

Dengan didahului oleh “*Doi Moi*” pada tahun 1986, Vietnam membuka diri terhadap dunia internasional dengan lebih terbuka, hal ini didukung dengan perubahan konstitusi Vietnam pada tahun 1992, di dalam pasal 12 Amandemen Konstitusi menyebutkan bahwa hubungan luar negeri Vietnam terhadap dunia internasional adalah bersifat damai, bersahabat, serta melakukan kerjasama di dunia internasional tanpa membedakan sistem politik dan sistem sosial yang berlaku di suatu Negara atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan dengan cara saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan suatu Negara serta tidak saling melakukan intervensi masalah internal (Vovworld, n.d.). Vietnam berusaha memperbaiki hubungan dengan Cina pada tahun 1991 dan Amerika Serikat pada tahun 1995. Berusaha mengesampingkan masalah Perang Vietnam yang telah berlalu dan menyambut kerjasama baru dalam rangka memperkuat Negara. Ketika Uni Soviet runtuh dan Vietnam kehilangan tempat untuk bergantung, yang dilakukan adalah merapat pada wilayah kawasan dimana tempatnya berada. Seiring dengan perkembangan ASEAN di kawasan Asia Tenggara menarik Vietnam untuk berpartisipasi di dalamnya, sehingga tahun 1995 bergabung menjadi anggota ASEAN untuk ikut berkiprah di kawasan Asia Tenggara dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Negara – Negara di kawasan tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka perimbangan kekuasaan (balancing) dimana kawasan Asia Tenggara sangat dekat posisinya dengan Cina sehingga dalam rangka mengantisipasi ancaman yang timbul dari Cina melalui kerjasama ASEAN (Roy, 2005, p. 307).

Perubahan sikap terbuka pada dunia internasional dengan menjadi memperbaiki hubungan dengan beberapa Negara serta masuk pada organisasi kawasan dinilai memiliki

nilai yang positif bagi perkembangan Vietnam. Pemantapan kebijakan luar negeri dilakukan pada saat Kongres IX tahun 2001 Partai Komunis Vietnam yang menghasilkan platform bahwa Vietnam sudah siap menjadi teman bagi semua Negara, sekaligus mitra bagi dunia internasional dengan landasan berkembang untuk kedamaian dan perkembangan (Vovworld, n.d.). Vietnam mulai memperluas jalinan kerjasamanya ke seluruh Negara di dunia. Melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral. Kemudian Vietnam berusaha untuk ikut serta menjadi anggota organisasi perdagangan dunia dengan tujuan memperkuat ekonominya. Pada tahun 2007 Vietnam resmi bergabung dengan World Trade Organisation (WTO) (Detik.com, 2007).

Pada tahun 2006 diselenggarakan Kongres Partai Komunis yang ke X dengan membangun platform kebijakan luar negeri bahwa Vietnam adalah teman sekaligus mitra setia semua Negara. Para elit politik di Vietnam sudah mulai sadar bahwa pada masa kini persaingan pengaruh di dunia internasional bukan lagi tujuan utama, namun sudah bergeser kepada keberhasilan membangun ekonomi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara (Cipto, 2007, p. 152). Dari perubahan platform yang dilakukan oleh Vietnam, hal ini menandakan perubahan kebijakan luar negeri dari Vietnam yang bertahap yang diikuti dengan tindakan yang bertahap pula oleh Vietnam.

Salah satu tindakan nyata untuk berteman dengan semua negara di dunia adalah dengan melakukan normalisasi hubungan dengan negara lain serta membuka hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia. Sebagai contoh yaitu pada normalisasi hubungan dengan Cina dan AS merupakan Negara yang memiliki sejarah panjang bagi Vietnam, namun ketika globalisasi berkembang pesat kedua Negara tersebut melesat jauh pada perekonomiannya, sehingga Vietnam harus berpikir secara rasional demi kepentingan nasionalnya. AS pada tahun 1994 mencabut embargo ekonomi terhadap Vietnam akibat invasi yang dilakukan oleh Vietnam terhadap Kamboja. Vietnam melakukan jempit bola dengan melakukan hubungan diplomatic dengan AS tahun 1995 dengan harapan agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan kerjasama di berbagai bidang. Pada awal kerjasama, AS mulai membuka banyak kantor cabang di Vietnam dan memasukkan sejumlah investasi. Untuk mempermudah investasi yang masuk, Vietnam melakukan penyederhanaan pada prosedur investasi, privatisasi BUMN, serta transparansi.

Daftar Pustaka

- Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara : Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cuc, N. T. K. (2000). *The Politics of Economy Reform in Vietnam: A Case of State - Owned - Enterprise Equitization*. Singapore: Department of Political Science National of Singapore.
- Detik.com. (2007). Vietnam jadi anggota WTO ke-150. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-729320/vietnam-resmi-jadi-anggota-wto-ke-150>
- Fearon, J. D. (2011). Bargaining, Enforcement, and International Cooperation. *The MIT Press.*, VOL 52 No. Retrieved from http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/political_science/shared/political_science/_previous/2011_Spring_Semester/Dynamics_of_Conflict_and_Cooperation/fearon_bargaining_enforcement.pdf
- Gates, C. L. (1995). Foreign Direct Investmen , institutional change, and Vietnam's Gradualis. *ISEAS*.
- Guan, A. C. (1998). Vietnam - China Relation since the Ends of The Cold War. *Asian Survey*, Vol. 38 No.
- Marangos, J. (2002). Alternative Methods of Institutional Development for Transition Economies. *Journal of INstitutional and Theoretical Economics (JITE)*.
- Naughton, B. (2007). The Chinese Economy : Transition And Growth. Retrieved from <Http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/16846/NguyenTKC.pdf?sequence=1>
- Roy, D. (2005). Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning? *Jurnal Contemporary Southeast Asia*.
- Rusmarina, N. (2016). *Kebijakan Luar Negeri Vietnam Pasca Perang Dingin (Diantara Rivalitas Cina - AS)*. Universitas Gadjah Mada.
- St. John, R. B. (1997). End of the Beginning: Economic Reform in Cambodia, Laos, and Vietnam. *ISEAS*, 19.
- T. Guzman, A. (2008). *How International Law Works: A Rational Choice Theory*. New York: Oxford University Press.
- UNRISD Country, O. (2008). Growth with Equity: "Double Click" for High Economic Growth and Quick Poverty Reduction The Case of Vietnam. *Developing Economies Study Department Institute of World Economy*, no.8.
- Vovworld. (n.d.). Vietnam Menegaskan Garis Politik Luar Negeri. Retrieved from <http://vovworld.vn/id-ID/Ulasan-Berita/Vietnam-menegaskan-garis-politik-hubungan-luar-negeri-yang-independen-dan-mandiri/144527>
- W.Kegley, JR, Charles, dan S. L. B. (2010). *Word Politics Trend and Transformation*. United States of America: Cengage Brain.

This page intentionally left blank